

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata (Masli, 2008). Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang, terutama di wilayah pesisir (Syahza, 2012).

Kawasan pesisir merupakan wilayah yang sangat berarti bagi kehidupan manusia di bumi. Sebagian besar penduduk tinggal di wilayah pesisir. Diberlakukannya secara efektif Konvensi Hukum Laut Internasional (*The Law of the Sea Convention*) pada tahun 1994 menetapkan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terbesar di dunia, secara hukum internasional. Indonesia memiliki 17.506 pulau besar dan kecil. Dengan total garis pantai yang diperkirakan sepanjang 81.000 km, Indonesia juga ditetapkan sebagai suatu negara yang

memiliki panjang garis pantai terpanjang nomor dua di dunia, di bawah Kanada (Dirhamsyah, 2006). Menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebuah visi yang didengungkan oleh pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin Presiden Jokowi. Namun demikian, pembangunan bidang kelautan dan perikanan hingga saat ini masih jauh dari harapan. Padahal wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan lautan kepulauan Indonesia disimpan potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal (Lasabuda, 2013).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wunani (2014) mengemukakan bahwa wilayah pesisir mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki habitat dan ekosistem (seperti estuari, terumbu karang, padang lamun) yang dapat menyediakan suatu (seperti ikan, minyak bumi, mineral) dan jasa (seperti bentuk perlindungan alam dan badai, arus pasang surut, rekreasi) untuk masyarakat pesisir.
2. Dicitrakan dengan persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya dan ruang oleh berbagai *stakeholders*, sehingga sering terjadi konflik yang berdampak pada menurunnya fungsi sumberdaya.
3. Menyediakan sumberdaya ekonomi nasional dari wilayah pesisir dimana dapat menghasilkan GNP (*gross national product*) dari kegiatan seperti pengembangan perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan lain-lain.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki daerah pesisir yang cukup luas adalah Provinsi Lampung. Daerah Lampung memiliki luas daratan 35.376 km², panjang garis pantai Lampung 1.105 km² (termasuk beberapa pulau), memiliki sekitar 69 buah pulau. Wilayah pesisirnya dapat dibagi atas 4 wilayah, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km) (Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung, 1999). Potensi wilayah pesisir sampai saat ini belum dikelola secara optimal, karena pemanfaatan yang dilakukan cenderung eksploitatif dan bersifat sektoral.

Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah pesisir yang cukup luas dan potensial adalah Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran juga ditetapkan sebagai kawasan minapolitan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Keputusan Nomor KEP 32/MeN/2010, memiliki luas perairan laut 689 km² atau 68900 Ha dengan panjang garis pantai 96 km dengan kedalaman rata-rata 50 meter (Dinas Kelautan dan Perikanan Pesawaran, 2010).

Pesawaran sebagai kabupaten pemekaran seharusnya sudah melakukan upaya pemerdayaan potensi wilayah pesisir yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP-3-K) sebagai bagian dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten (RZWP-3-K). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 UU PWP-3-K meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian

terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sampai saat ini belum dilakukannya upaya pemerdayaan potensi wilayah pesisir sesuai amanat Undang-Undang tersebut, dan berdasarkan penetapan dalam RPJMN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI 2010-2014 Kabupaten Pesawaran ditetapkan sebagai kabupaten tertinggal.

Kabupaten Pesawaran memiliki kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Punduh Pidada dan Kecamatan Padang Cermin. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesawaran (Tabel 1), tingkat kemiskinan dan ketertinggalan kawasan pesisir menunjukkan indikasi lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, kemungkinan ini disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam wilayah pesisir secara berdayaguna dan berhasilguna menjadi salah satu alasan penyebab tingginya tingkat kemiskinan dan dikategorikan sebagai daerah tertinggal atau sebagai kawasan lahan tidur.

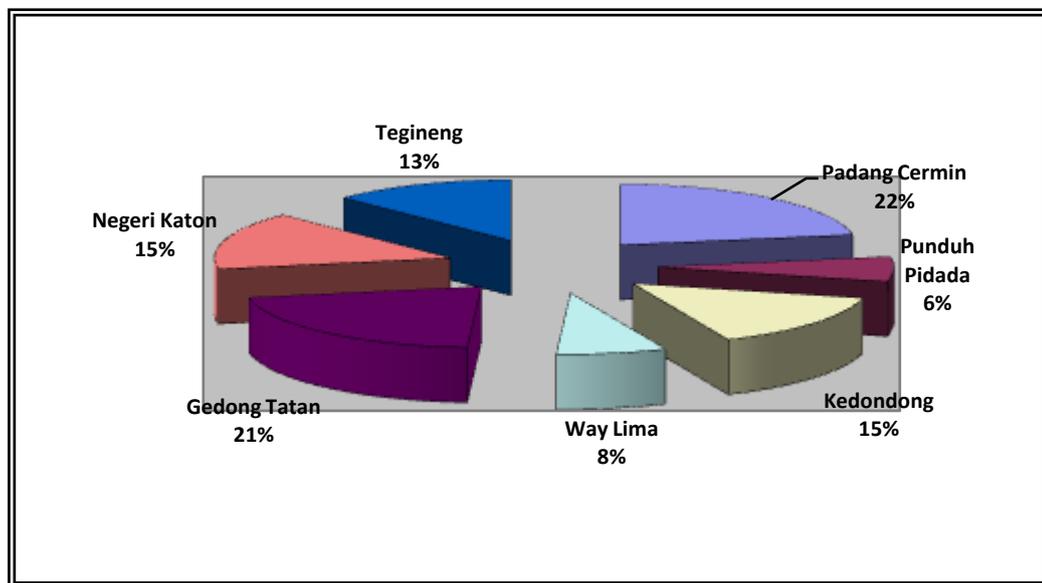
Tabel 1. Desa Tertinggal dan Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan di Kabupaten Pesawaran

NO	KECAMATAN	Desa Tertinggal (Bappeda, BPS &PMD)	Desa Tertinggal Menurut Kementerian DPDTT	JUMLAH RTM 2010	JUMLAH RTM 2011
1	Padang Cermin	1. Bunut Seberang 2. Gebang 3. Hanau Berak 4. Paya 5. Sidodadi 6. Sumber Jaya 7. Suka Jaya 8. Lempasing 8. Banjaran	1. Banjaran 2. Bunut Seberang 3. Sumber Jaya 4. Gunung Rejo 5. Pesawaran Indah 6. Tambangan 7. Sidodadi 8. Hurun 9. Tanjung Agung 10.Suka Jaya Lempasing 11.Harapan Jaya	11.746	11.039
2	Punduh Pidada	1. Sukajaya Pundu 2. Maja 3. Penyandingan 4. Tajur 5. Umbul Limus 6. Pekon Ampal 7. Kunyayang 8. Kekatang 9. Pulau Pahawang 10. Sukarame 11. Kota Jawa 12. Rusaba 13. Sukajaya Pidada 14. Banding Agung 15. Batu Raja 16. Pulau Legundi 17. Pagar Jaya 18. Bawang	1. Sukamaju 2. Pagar Jaya 3. Pulau Legundi 4. Sukarame 5. Kota Jawa 6. Rusaba 7. Sukajaya Pidada 8. Baturaja 9. Banding Agung 10.Kampung Baru 11.Kekatang 12.Pekon Ampal 13.Kunyayang 14.Umbul Limus 15.Tajur 16.Penyandingan 17.Sukajaya Pundu 18.Pulau Pahawang	4.340	4.147
3	Kedondong	1. Penengahan 2. Sukajaya 3. Padang Cermin 4. Kota Jawa 5. Kubu Batu 6. Way Kepayang 7. Sukamaju 8. Kartasana 9. Gunung Sugih 10.Bayas Jaya	1. Bayas Jaya 2. Suka Jaya 3. Penengahan 4. Tanjung Kerta 5. Kota Jawa 6. Mada Jaya 7. Kubu Batu 8. Suka Maju 9. Sinar Harapan 10. Kertasana 11. Gunung Sugih 12. Babakan Loa 13. Pesawaran 14. Teba Jaya	8.755	8.572

NO	KECAMATAN	Desa Tertinggal (Bappeda, BPS &PMD)	Desa Tertinggal Menurut Kementerian DPDTT	JUMLAH RTM 2010	JUMLAH RTM 2011
4	Way Lima	1. Padang Manis 2. Sidodadi 3. Pekondoh 4. Gedung 5. Pekondoh 6. Gedung Dalam 7. Sindang Garut 8. Baturaja 9. Way Harong 10. Gunung Rejo 10. Margodadi	1. Way Lima 2. Cimanuk 3. Sukamandi 4. Margodadi 5. Tanjung Agung 6. Sindang Garut 7. Pekon Doh 8. Banjar Negeri 9. Padang Manis	5.195	5.213
5	Gedong Tataan	1. Padang Ratu 2. Cipadang 3. Bogorejo	1. Cipadang 2. Kutaarjo 3. Karang Anyar 4. Taman Sari 5. Bernung 6. Sungai Langka	8.644	8.271
6	Negeri Katon	1. Halangan Ratu 2. Negara Saka 3. Sinar Bandung 4. Tanjung Rejo 5. Lumbirejo	1. Pujo Rahayu 2. Tanjung Rejo 3. Negeri Katon 4. Negara Saka 5. Halangan Ratu 6. Lumbirejo 7. Sidomulyo 8. Poncokresno 9. Tri Rahayu 10. Sinar Bandung 11. Bangun Sari 12. Karang Rejo	8.037	7.176
7	Tegineneng	1. Gunung Sugih 2. Sinar Jati 3. Margorejo 4. Pancabakti	1. Gedung Gumanti 2. Bumi Agung 3. Batang Hari 4. Rejo Agung 5. Kota Agung 6. Negara Ratu 7. Gunung Sugih 8. Margomulyo 9. Sinar Jati 10. Mergorejo 11. Germing	6.099	5.971
JUMLAH		58	81	50.389	47.389

Sumber : Bappeda Kabupaten Pesawaran, 2012

Gambar 1 menjelaskan grafik persebaran penduduk di Kabupaten Pesawaran. Kecamatan Punduh Pidada memiliki jumlah penduduk paling sedikit diantara kecamatan lain, yaitu hanya 6% dari jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Pesawaran atau 26.225 jiwa, dengan Jumlah Rumah Tangga yaitu 6.676 Kepala Keluarga (BPS,2012). Menurut Syahza (2012), masyarakat di daerah tertinggal terutama di wilayah pesisir relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang, sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat.



Gambar 1. Grafik Persebaran Penduduk di Kabupaten Pesawaran

Sumber : BPS , Pesawaran Dalam Angka, Tahun 2012

Kecamatan punduh pidada merupakan daerah pesisir dengan luas 110,46 km² (Statistik Kecamatan Punduh Pidada, 2013). Kecamatan ini ditetapkan sebagai kawasan minapolitan yang memiliki banyak potensi sumberdaya yang besar. Kecamatan ini memiliki potensi tangkapan dan budidaya hasil laut yang cukup besar. Wilayah Kecamatan Punduh Pidada memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra tambak udang. Tambak udang dapat dikelola menjadi keunggulan

tersendiri, karena udang yang dihasilkan adalah untuk orientasi ekspor. Selain itu, menyasar pasar ekspor, ikan kerapu adalah jenis komoditi primadona di kecamatan ini. Ikan kerapu adalah jenis komoditi yang amat tinggi nilai ekonomisnya, tentu saja tinggi kandungan gizinya. Begitu juga potensi budidaya perikanan perairan darat atau ikan air tawar.

Untuk potensi pariwisata, kegiatan pariwisata di Kabupaten Pesawaran lebih banyak berkembang di Kecamatan Padang Cermin. Sedangkan Pariwisata di Kecamatan Punduh Pidada belum banyak dikembangkan (Prastiwi, 2013). Potensi pariwisata di Kecamatan Punduh Pidada tidak kalah menarik, bila dapat terkelola dengan baik. Beberapa desa di Kecamatan Punduh Pidada memiliki pantai putih bersih nan eksotis, tetapi karena sulitnya akses jalan untuk mencapainya, potensi tersebut belum tersentuh secara profesional, dan masih banyak lagi potensi sumber daya alam lainnya yang belum termanfaatkan dan dikelola secara optimal.

Pembangunan di Kecamatan Punduh Pidada memerlukan penanganan yang optimal guna mendukung perkembangan wilayah berbasis sumberdaya lokal agar sejajar dengan daerah lain yang telah berkembang. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mengenai strategi pembangunan daerah tertinggal di wilayah pesisir Kecamatan Punduh Pidada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apa strategi yang tepat dalam pembangunan daerah tertinggal di wilayah pesisir Kecamatan Punduh Pidada?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk menentukan strategi yang tepat dalam pembangunan daerah tertinggal di wilayah pesisir Kecamatan Punduh Pidada.

D. Manfaat Penelitian

1. Bahan pertimbangan dalam rangka perencanaan dan penentuan strategi kebijakan pembangunan di wilayah pesisir Kecamatan Punduh Pidada.
2. Bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak-pihak yang berminat dalam pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Punduh Pidada.
3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan wilayah pesisir dalam kaitannya dengan menumbuhkan ekonomi Kecamatan Punduh Pidada, dan kerangka pemikiran parsialnya ialah pembangunan wilayah dan pembangunan ekonomi. Perbedaan mendasar ilmu ekonomi dan ilmu wilayah ialah pada masalah ruang (Budiharsono, 2001). Ruang merupakan hal yang penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang sangat berkaitan dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan segala kekayaannya membutuhkan organisasi/pengaturan unit tata ruang yang disebut wilayah (Ekaputra, 2009).

Dalam konsep wilayah, pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan, namun bisa juga dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduk

yang tergabung di bawah garis kemiskina. Sebagai wilayah nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang dengan wilayah perkotaan sebagai intinya. Bahkan seringkali wilayah pesisir dianggap sebagai halaman belakang (*back yard*) yang merupakan tempat pembuangan segala macam limbah. Sehubungan dengan fungsinya sebagai wilayah belakang, maka wilayah pesisir merupakan penyedia *input* (pasar *input*) bagi inti dan pasar bagi barang-barang jadi (*output*).

Sebagai wilayah administrasi, wilayah pesisir dapat berupa wilayah administrasi yang relatif kecil yaitu kecamatan atau desa, namun dapat pula berupa kabupaten/kota dalam bentuk pulau kecil. Sedangkan sebagai wilayah perencanaan, batas wilayah pesisir lebih ditentukan oleh kriteria ekologis, sehingga melewati batas-batas wilayah administratif. Terganggunya keseimbangan fisik-ekologis dalam wilayah ini akan berdampak negatif yang tidak hanya dirasakan oleh daerah tersebut tetapi juga daerah sekitarnya yang merupakan kesatuan wilayah sistem (kawasan). Oleh karena itu dalam pembangunan dan pengembangan wilayah ini diperlukan suatu perencanaan terpadu yang tidak menutup kemungkinan adanya lintas batas administratif (Budiharsono, 2001).

Menurut Kusumastanto (2003), masyarakat pesisir memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dengan beberapa kelompok masyarakat industri atau kelompok masyarakat lainnya. Perbedaan ini dimungkinkan oleh eratnya keterkaitan terhadap karakteristik ekonomi, ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi, maupun latar belakang adat dan budaya. Hal ini perlu mendapat

perhatian yang serius dari pemerintah, dengan melibatkan masyarakat di dalam proses pembangunan.

Untuk itu diperlukan suatu kajian yang menyeluruh dan mendalam tentang prospek pengembangan di wilayah pesisir Kecamatan Punduh Pidada, sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimiliki, kemauan masyarakat dan kepentingan semua *stakeholders*, supaya berkelanjutan. Pendekatan kerangka pikir penelitian yang akan dilakukan diarahkan pada strategi pembangunan daerah tertinggal di wilayah pesisir Kecamatan Punduh Pidada.

Dalam penelitian ini disusun perumusan strategi dengan melalui tiga tahap yakni tahap masukan, tahap pemaduan, dan tahap keputusan. Kajian ini diawali dengan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal. Hasil analisis internal menghasilkan *Strenght* dan *Weakness*, dan analisis eksternal menghasilkan *Opportunity* dan *Threats* dalam bentuk matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) dan matriks EFE (*External Factor Evaluation*).

Setelah melalui tahapan kerja matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) maka akan diperoleh nilai rata-rata skor total bagi wilayah yang dinilai. Jika nilainya dibawah 2,5 menandakan bahwa secara internal, wilayah adalah lemah, sedangkan yang berada di atas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat. Nilai rata-rata adalah 2,5 (Umar, 2001).

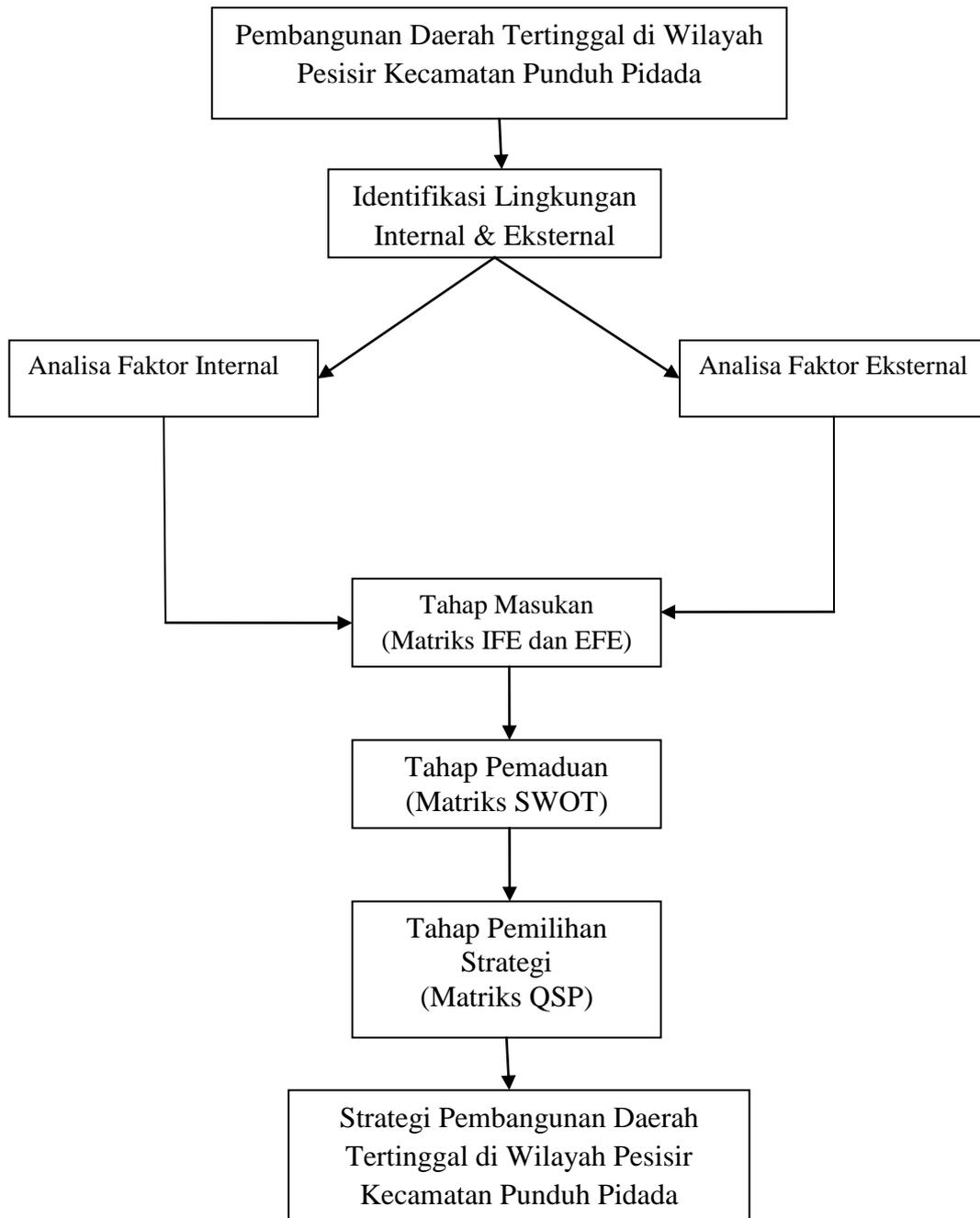
Untuk tahapan akhir dalam matriks EFE (*External Factor Evaluation*) jika nilai rata-rata skor total bagi wilayah yang dinilai adalah 4,0 mengindikasikan bahwa wilayah merespons dengan yang luar biasa terhadap peluang-peluang yang ada

dan menghindari ancaman-ancaman. Sementara itu, skor total sebesar 1,0 menunjukkan bahwa wilayah tidak memanfaatkan peluang-peluang yang ada atau tidak menghindari ancaman-ancaman eksternal (Umar,2001).

Hasil dari identifikasi matriks ini digunakan untuk menyusun suatu matriks *Strength- Weakness- Opportunity- Threats* (SWOT) yang akan menghasilkan berbagai alternatif strategi. Yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan matriks *Quantative Strategies Planning* (QSP). Pada tahap akhir dari matriks *Quantative Strategies Planning* (QSP) adalah mendapatkan *Total Attractiveness Scores* (TAS) yang didapat dari perkalian bobot dengan nilai yang menunjukkan kemenarikan relatif untuk masing-masing strategi yang terpilih (*Attractive Score*).

Dari nilai TAS yang didapat, nilai TAS dari alternatif strategi yang tertinggilah yang menunjukkan bahwa alternatif strategi itu yang menjadi pilihan utama. Nilai TAS terkecil menunjukkan bahwa alternatif strategi ini menjadi pilihan terakhir. Sehingga akan didapatkan strategi terbaik dari pembangunan wilayah di masa yang akan datang.

Maka diharapkan kajian mengenai Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal di Wilayah Pesisir Kecamatan Punduh Pidada ini dapat dijadikan landasan bagi pemerintah dalam rangka mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Kerangka Pemikiran kajian ini tersaji dalam Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber : Umar, 2001

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulisan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu :

- BAB I** Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan pustaka yang berisikan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini.
- BAB III** Metode penelitian yang berisikan tentang bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
- BAB IV** Hasil dan Pembahasan
- BAB V** Simpulan dan Saran